



Pengaruh Media Sosial terhadap Kesadaran Politik Mahasiswa di Era Post-Truth: Analisis Data Kuesioner Mahasiswa Universitas Palangka Raya

Fahrul Fahlevi ¹⁾; Aprianur ²⁾; Aufa Ahmad ³⁾; Markcelino Mahendra ⁴⁾; Arjunna ⁵⁾

Nabilla Syahvalensi ⁶⁾; Bhayu Rhama ⁷⁾

1234567) Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Email: ³⁾ aufaahmad1227@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [17 Mei 2026]

Revised [20 Juni 2026]

Accepted [26 Juni 2026]

KEYWORDS

Social Media, Post-Truth, Digital Literacy, Disinformation, Algorithms, Political Awareness, Digital Political Participation.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh media sosial terhadap kesadaran politik mahasiswa di era post-truth dengan menekankan hubungan antara intensitas penggunaan media sosial, literasi digital, persepsi politik, serta kesadaran dan partisipasi politik. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif melalui kuesioner skala Likert 5 poin kepada 36 mahasiswa. Data dikelompokkan ke dalam empat dimensi, yaitu intensitas penggunaan dan eksposur media sosial, literasi digital dan verifikasi informasi, pengaruh media sosial terhadap persepsi politik, serta kesadaran dan partisipasi politik mahasiswa. Hasil analisis menunjukkan bahwa intensitas penggunaan dan eksposur media sosial berada pada kategori tinggi dengan skor rata-rata 4,14. Dimensi pengaruh media sosial terhadap persepsi politik memperoleh rata-rata 4,01, sedangkan literasi digital dan verifikasi informasi memperoleh rata-rata 4,01. Dimensi kesadaran dan partisipasi politik mahasiswa memperoleh skor rata-rata 3,65. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki keterpaparan tinggi terhadap informasi politik di media sosial dan kesadaran kritis yang cukup baik, tetapi partisipasi politik aktif seperti mengikuti diskusi, menandatangani petisi, dan membagikan konten politik masih relatif lebih rendah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of social media on students' political awareness in the post-truth era by emphasizing the relationship between social media intensity, digital literacy, political perception, and political awareness and participation. This research employed a descriptive quantitative approach using a five-point Likert-scale questionnaire administered to 36 university students. The questionnaire items were grouped into four dimensions: intensity of social media use and exposure, digital literacy and information verification, the influence of social media on political perception, and students' political awareness and participation. The findings show that the dimension of social media use and exposure obtained the highest mean score of 4.14. The dimension of social media influence on political perception reached 4.01, while digital literacy and information verification obtained a mean score of 4.01. Students' political awareness and participation recorded the lowest mean score of 3.65. These findings indicate that students are highly exposed to political information on social media and have fairly good critical awareness, yet active political participation such as joining online political discussions, signing online petitions, and sharing political content remains relatively lower.

PENDAHULUAN

Kehadiran media sosial secara masif telah mentransformasi cara mahasiswa, termasuk di Universitas Palangka Raya, dalam mengakses, menyaring, dan mendiskusikan informasi politik. Platform digital kini tidak semata-mata menjadi sarana komunikasi antarpribadi, melainkan telah berkembang menjadi arena publik tempat berbagai wacana politik, kampanye, kritik sosial, dan perdebatan ideologis berlangsung dengan kecepatan tinggi. Dalam konteks Indonesia, intensitas penggunaan internet yang terus meningkat menunjukkan ketergantungan masyarakat yang semakin dalam terhadap teknologi digital sebagai sumber informasi. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa publikasi Statistik Telekomunikasi Indonesia memuat perkembangan penggunaan internet dan pola akses teknologi informasi di Indonesia, sehingga konteks ini relevan untuk memahami perubahan pola informasi mahasiswa (BPS, 2025).

Dinamika tersebut semakin krusial untuk dikaji dalam lanskap era post-truth. Pada era ini, kebenaran faktual tidak selalu menjadi faktor penentu dalam penerimaan informasi politik; sebaliknya, respons emosional, afiliasi identitas, viralitas konten, dan repetisi pesan di ruang digital justru sering kali lebih dominan memengaruhi opini. Kondisi ini menempatkan mahasiswa pada posisi yang kompleks,

karena mereka tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi pasif, tetapi secara aktif turut menyebarluaskan, menafsirkan, dan memperkuat narasi-narasi politik di ekosistem digital.

Kajian-kajian terkini mengindikasikan bahwa dampak media digital terhadap kehidupan demokratis bersifat ambivalen. Di satu sisi, media digital berpotensi mendorong peningkatan konsumsi informasi politik dan mendorong partisipasi warga. Di sisi lain, media digital juga kerap dikaitkan dengan menguatnya polarisasi, erosi kepercayaan terhadap institusi politik, dan percepatan persebaran disinformasi (Lorenz-Spreen et al., 2023). Atas dasar itu, media sosial perlu dikaji sebagai ruang yang memiliki fungsi ganda: di satu sisi membuka peluang penguatan kesadaran politik, sementara di sisi lain menyimpan risiko distorsi informasi yang tidak dapat diabaikan.

Berdasarkan data kuesioner yang dianalisis, penelitian ini berfokus pada empat dimensi utama, yaitu intensitas penggunaan dan eksposur media sosial, literasi digital dan verifikasi informasi, pengaruh media sosial terhadap persepsi politik, serta kesadaran dan partisipasi politik mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pola hubungan deskriptif antar dimensi tersebut, mengidentifikasi kecenderungan utama dari jawaban responden, serta merumuskan pembahasan akademik mengenai posisi mahasiswa sebagai pengguna media sosial dalam ekosistem informasi politik era post-truth.

LANDASAN TEORI

Media Sosial dan Ruang Politik Digital

Media sosial dapat dipahami sebagai infrastruktur komunikasi digital yang memungkinkan pengguna memproduksi, membagikan, dan merespons informasi secara cepat. Dalam politik, media sosial memperluas akses terhadap informasi politik karena mahasiswa dapat memperoleh berita, opini, dan diskusi politik tanpa selalu bergantung pada media arus utama. Vaccari dan Valeriani (2021) menunjukkan bahwa pengalaman politik di media sosial, seperti paparan tidak sengaja terhadap berita politik, pesan mobilisasi, dan perjumpaan dengan konten politik, memiliki implikasi terhadap partisipasi politik warga.

Namun, manfaat media sosial tidak dapat dilepaskan dari struktur platform. Algoritma kurasi konten dapat menentukan informasi apa yang lebih sering muncul di beranda pengguna. Metzler dan Garcia (2024) menjelaskan bahwa mekanisme algoritmik dalam media digital sering bekerja melalui umpan balik antara perilaku sosial pengguna dan sistem rekomendasi platform. Artinya, algoritma tidak berdiri sendiri, tetapi dapat memperkuat kecenderungan sosial yang sudah ada, seperti preferensi terhadap informasi yang sejalan dengan pandangan pribadi.

Post-Truth, Hoaks, dan Disinformasi

Era post-truth merujuk pada situasi ketika klaim politik dan sosial sering kali memperoleh pengaruh bukan semata-mata karena kebenaran faktual, melainkan karena daya tarik emosional, keberpihakan identitas, dan penyebaran berulang melalui media digital. Dalam konteks ini, hoaks dan disinformasi menjadi persoalan penting karena dapat memengaruhi persepsi politik mahasiswa sebelum mereka melakukan verifikasi informasi.

Ecker et al. (2022) menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap misinformasi dipengaruhi oleh faktor kognitif, sosial, dan afektif, serta dapat tetap bertahan meskipun koreksi sudah diberikan. Pennycook dan Rand (2021) juga menekankan bahwa kerentanan terhadap berita palsu berkaitan dengan proses penalaran, perhatian terhadap akurasi, dan kecenderungan pengguna untuk merespons konten secara cepat tanpa pemeriksaan kritis. Dengan demikian, literasi digital tidak cukup hanya dipahami sebagai kemampuan menggunakan teknologi, tetapi harus mencakup kemampuan mengevaluasi kebenaran informasi.

Literasi Digital dan Verifikasi Informasi

Literasi digital merupakan kemampuan untuk mengakses, menilai, menggunakan, dan membagikan informasi secara kritis serta bertanggung jawab. Kerangka DigComp 2.2 menempatkan kompetensi digital sebagai kemampuan warga untuk menggunakan teknologi secara percaya diri, kritis, aman, dan bertanggung jawab, termasuk dalam menghadapi sistem berbasis kecerdasan buatan dan lingkungan informasi yang kompleks (Vuorikari et al., 2022).

UNESCO (2021) juga menekankan pentingnya media and information literacy sebagai gabungan kompetensi informasi, media, dan digital untuk membantu warga berpikir kritis, memeriksa informasi, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab. Dalam penelitian ini, literasi digital diukur melalui perilaku verifikasi informasi, sikap kritis terhadap era post-truth, pengalaman terpengaruh hoaks, tingkat kepercayaan terhadap informasi politik di media sosial, serta pandangan mengenai pentingnya literasi digital dalam menghadapi disinformasi.



Algoritma, Echo Chamber, dan Persepsi Politik

Algoritma media sosial memiliki peran penting dalam membentuk pengalaman informasi pengguna. Cinelli et al. (2021) menunjukkan bahwa dinamika platform dapat memengaruhi pembentukan echo chamber dan penyebaran informasi di dalam kelompok pengguna yang memiliki kecenderungan serupa. Kubin dan von Sikorski (2021) melalui telaah sistematis juga menunjukkan bahwa media sosial berhubungan dengan proses polarisasi politik, terutama ketika pengguna lebih sering terpapar konten yang memperkuat pandangan sendiri.

Dalam konteks mahasiswa, paparan algoritmik dapat menimbulkan dua konsekuensi. Pertama, mahasiswa lebih mudah menemukan informasi politik karena konten politik dapat muncul di beranda tanpa dicari secara aktif. Kedua, mahasiswa berpotensi menerima informasi yang homogen, emosional, atau menyesatkan. Oleh karena itu, persepsi politik mahasiswa perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara intensitas penggunaan media sosial, kemampuan literasi digital, dan struktur algoritmik platform.

Kesadaran Politik dan Partisipasi Politik Digital

Kesadaran politik mahasiswa mencakup pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, pengetahuan terhadap isu dan aktor politik, serta keyakinan bahwa suara mahasiswa memiliki arti dalam proses politik. Partisipasi politik digital merujuk pada aktivitas politik yang dilakukan melalui media digital, seperti mengikuti diskusi politik daring, membagikan konten politik, menyebarkan ajakan partisipasi, atau menandatangani petisi online.

Kajian Lorenz-Spreen et al. (2023) menunjukkan bahwa media digital dapat berasosiasi positif dengan konsumsi informasi dan partisipasi politik, tetapi juga dapat membawa dampak negatif seperti polarisasi dan penurunan kepercayaan. Karena itu, tingginya paparan informasi politik tidak selalu otomatis menghasilkan partisipasi aktif. Penelitian ini menempatkan kesadaran politik dan partisipasi politik sebagai dimensi akhir yang menunjukkan apakah paparan media sosial dan literasi digital benar-benar berhubungan dengan keterlibatan politik mahasiswa.

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Pengaruh Media Sosial terhadap Kesadaran Politik Mahasiswa di Era Post-Truth



Sumber: Diolah dari hasil kuesioner penelitian

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menggambarkan kecenderungan jawaban responden berdasarkan skor rata-rata item dan skor rata-rata dimensi, bukan menguji hubungan kausal secara inferensial. Analisis yang dilakukan bersifat deskriptif terhadap data kuesioner yang tersedia.

Responden dan Instrumen

Responden penelitian adalah 36 mahasiswa Universitas Palangka Raya, terdiri atas laki-laki dan perempuan dari program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pengisian kuesioner dilaksanakan secara daring pada periode 9 hingga 11 Juni 2025. Instrumen penelitian berupa

kuesioner skala Likert 5 poin, yaitu sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), dan sangat setuju (5).

Dimensi Penelitian

Item kuesioner dikelompokkan ke dalam empat dimensi. Dimensi pertama adalah intensitas penggunaan dan eksposur media sosial yang mencakup Q1-Q4. Dimensi kedua adalah literasi digital dan verifikasi informasi yang mencakup Q5, Q6, Q8, Q9, Q18, dan Q20. Dimensi ketiga adalah pengaruh media sosial terhadap persepsi politik yang mencakup Q7, Q10, dan Q13. Dimensi keempat adalah kesadaran dan partisipasi politik mahasiswa yang mencakup Q11, Q12, Q14, Q15, Q16, Q17, dan Q19.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menghitung frekuensi jawaban, skor rata-rata per item, dan skor rata-rata per dimensi. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif sebagai teknik utama karena bertujuan menggambarkan kecenderungan jawaban responden secara sistematis. Analisis lanjutan seperti uji Cronbach's Alpha dan uji korelasi antar dimensi dapat dijadikan pertimbangan untuk pengembangan penelitian berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

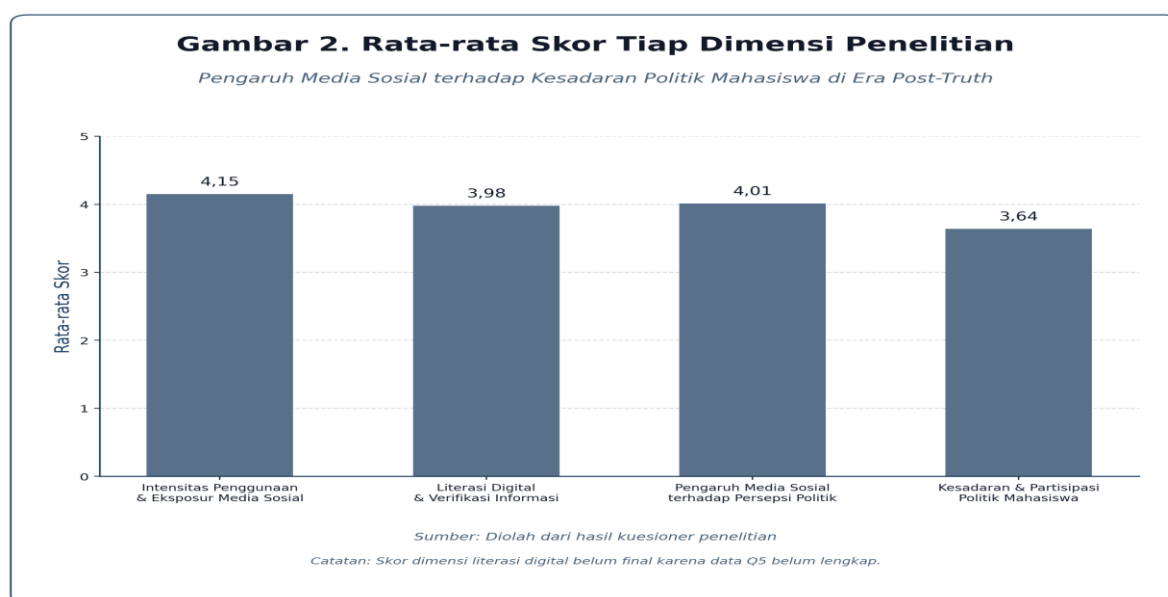
Hasil

Rangkuman Skor per Dimensi

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa dimensi intensitas penggunaan dan eksposur media sosial memiliki skor rata-rata tertinggi, yaitu 4,14. Dimensi pengaruh media sosial terhadap persepsi politik dan dimensi literasi digital dan verifikasi informasi sama-sama memperoleh skor rata-rata 4,01. Sementara itu, dimensi kesadaran dan partisipasi politik mahasiswa memperoleh skor rata-rata 3,65 sebagai dimensi terendah. Rangkuman hasil tersebut disajikan pada Tabel 1.

No.	Dimensi	Item Terkait	Rata-rata Skor	Keterangan
1	Intensitas Penggunaan & Eksposur Media Sosial	Q1, Q2, Q3, Q4	4,14	Tinggi
2	Literasi Digital & Verifikasi Informasi	Q5, Q6, Q8, Q9, Q18, Q20	4,01	Tinggi
3	Pengaruh Media Sosial terhadap Persepsi Politik	Q7, Q10, Q13	4,01	Tinggi
4	Kesadaran & Partisipasi Politik Mahasiswa	Q11, Q12, Q14, Q15, Q16, Q17, Q19	3,65	Cukup; partisipasi aktif lebih rendah

Sumber: Diolah dari hasil kuesioner penelitian



Sumber: Diolah dari hasil kuesioner penelitian (n=36)



Temuan Item Kuesioner yang Menonjol

Pada dimensi intensitas penggunaan dan eksposur media sosial, tiga item awal menunjukkan skor yang sangat tinggi: penggunaan media sosial lebih dari tiga jam per hari (Q1 = 4,28), media sosial sebagai sumber utama informasi politik (Q2 = 4,39), dan frekuensi melihat konten politik di beranda media sosial (Q3 = 4,33). Namun, item mengikuti akun-akun politik (Q4 = 3,58) lebih rendah dibandingkan tiga item tersebut. Pola ini menunjukkan bahwa eksposur mahasiswa terhadap konten politik cenderung kuat, tetapi tidak seluruhnya berasal dari pencarian aktif; sebagian dapat muncul secara pasif melalui algoritma beranda.

Pada dimensi literasi digital, skor tertinggi terdapat pada pentingnya literasi digital untuk menghadapi disinformasi politik (Q20 = 4,47) dan kebiasaan memverifikasi informasi politik sebelum membagikannya (Q6 = 4,31). Kemampuan membedakan berita benar dan hoaks di media sosial (Q5 = 4,14) juga berada pada kategori tinggi. Akan tetapi, item pernah terpengaruh informasi politik yang ternyata hoaks (Q8 = 3,69) dan kepercayaan terhadap informasi politik di media sosial (Q9 = 3,42) menunjukkan bahwa kesadaran kritis belum sepenuhnya menghilangkan kerentanan terhadap hoaks.

Pada dimensi kesadaran dan partisipasi politik, skor kognitif relatif tinggi, seperti memahami hak dan kewajiban warga negara (Q11 = 4,25) dan merasa suara mahasiswa penting dalam politik (Q17 = 4,14). Sebaliknya, partisipasi aktif seperti mengikuti diskusi politik online (Q14 = 3,31), menandatangani petisi online terkait isu politik (Q15 = 2,78), dan membagikan konten politik untuk meningkatkan kesadaran orang lain (Q16 = 3,61) lebih rendah. Temuan ini memperlihatkan adanya jarak antara kesadaran politik dan partisipasi politik aktif.

Tabel 2. Ringkasan Item dengan Skor Menonjol

Kelompok Temuan	Item	Skor	Makna Analitis
Eksposur tinggi	Q2: Media sosial sebagai sumber utama informasi politik	4,39	Media sosial menjadi kanal penting informasi politik mahasiswa.
Literasi digital tinggi	Q20: Literasi digital penting menghadapi disinformasi politik	4,47	Kesadaran normatif terhadap literasi digital sangat kuat.
Kesadaran politik tinggi	Q11: Memahami hak dan kewajiban warga negara	4,25	Kesadaran kognitif kewargaan relatif tinggi.
Partisipasi aktif rendah	Q15: Menandatangani petisi online terkait isu politik	2,78	Partisipasi politik digital konkret masih rendah.
Catatan data	Q5: Mampu membedakan berita benar dan hoaks	Perlu dilengkapi	Data tersedia; skor final 4,14.

Sumber: Diolah dari hasil kuesioner penelitian

Pembahasan

Penggunaan Media Sosial Mahasiswa Berada pada Tingkat Tinggi

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa mahasiswa Universitas Palangka Raya memiliki tingkat penggunaan media sosial yang tergolong intensif, dengan skor dimensi sebesar 4,14. Angka ini mencerminkan bahwa media sosial telah menyatu dalam ritme keseharian mahasiswa dan berfungsi sebagai kanal utama dalam mengonsumsi informasi politik. Capaian skor yang tinggi pada Q1, Q2, dan Q3 mengindikasikan bahwa media sosial tidak hanya dimanfaatkan untuk keperluan hiburan atau komunikasi interpersonal semata, melainkan juga telah bertransformasi menjadi ruang penting bagi mahasiswa dalam mengikuti perkembangan isu-isu politik.

Namun, skor Q4 yang lebih rendah dibandingkan Q1-Q3 menunjukkan bahwa paparan terhadap konten politik tidak sepenuhnya bersifat aktif. Mahasiswa sering melihat konten politik di beranda, tetapi tidak selalu aktif mengikuti akun-akun politik. Temuan ini relevan dengan penjelasan Metzler dan Garcia (2024) tentang mekanisme algoritmik yang bekerja melalui interaksi antara perilaku pengguna dan sistem rekomendasi. Dengan kata lain, mahasiswa dapat terpapar konten politik meskipun tidak secara sengaja mencari konten tersebut.

Literasi Digital Cukup Baik, tetapi Belum Sepenuhnya Melindungi dari Hoaks

Dimensi literasi digital dan verifikasi informasi memperoleh skor 4,01. Skor ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran yang baik mengenai pentingnya verifikasi informasi, terutama terlihat dari Q5 (4,14), Q6 (4,31), dan Q20 (4,47) yang tinggi. Mahasiswa cenderung menyatakan bahwa mereka

mampu membedakan berita benar dan hoaks, memeriksa informasi politik sebelum membagikannya, serta mengakui pentingnya literasi digital untuk menghadapi disinformasi politik.

Meski demikian, skor Q8 (3,69) dan Q9 (3,42) menunjukkan adanya ketegangan antara kesadaran ideal dan praktik nyata. Mahasiswa menyadari pentingnya literasi digital, tetapi sebagian masih pernah terpengaruh informasi politik yang ternyata hoaks, dan tingkat kepercayaan terhadap informasi di media sosial masih moderat. Hal ini sejalan dengan Ecker et al. (2022), yang menunjukkan bahwa misinformasi dapat bertahan karena dipengaruhi faktor kognitif, sosial, dan afektif. Pennycook dan Rand (2021) juga menekankan pentingnya perhatian terhadap akurasi karena pengguna media sosial sering kali membagikan atau mempercayai informasi tanpa cukup refleksi.

Media Sosial Memengaruhi Persepsi Politik Mahasiswa

Dimensi pengaruh media sosial terhadap persepsi politik memperoleh skor rata-rata 4,01. Hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa menyadari bahwa media sosial memiliki pengaruh terhadap cara mereka memahami isu politik. Skor tinggi pada Q7 memperlihatkan bahwa mahasiswa menganggap media sosial mempermudah penyebaran informasi menyesatkan. Pada saat yang sama, Q13 menunjukkan bahwa media sosial juga dianggap meningkatkan kesadaran politik mahasiswa.

Temuan ini memperkuat karakter ganda media sosial dalam kehidupan politik. Di satu sisi, media sosial memperluas akses terhadap informasi politik. Di sisi lain, media sosial dapat menciptakan ruang informasi yang rentan terhadap echo chamber, bias algoritmik, dan penyebaran disinformasi. Cinelli et al. (2021) menunjukkan bahwa struktur platform dapat memengaruhi pembentukan echo chamber, sedangkan Kubin dan von Sikorski (2021) menemukan bahwa media sosial memiliki keterkaitan dengan polarisasi politik. Dengan demikian, media sosial dalam penelitian ini tidak dapat dilihat hanya sebagai sarana peningkatan kesadaran politik, tetapi juga sebagai ruang yang perlu diimbangi oleh literasi digital.

Kesadaran Politik Tinggi, tetapi Partisipasi Politik Aktif Lebih Rendah

Dimensi kesadaran dan partisipasi politik mahasiswa memperoleh skor rata-rata 3,65, menjadi dimensi terendah dibandingkan tiga dimensi lain. Apabila dilihat lebih rinci, skor kesadaran politik yang bersifat kognitif relatif tinggi, misalnya Q11 sebesar 4,25 dan Q17 sebesar 4,14. Artinya, mahasiswa merasa memahami hak dan kewajibannya serta menganggap suara mahasiswa penting dalam politik.

Namun, partisipasi politik aktif menunjukkan skor yang lebih rendah. Q14 memperoleh skor 3,31, Q15 hanya 2,78, dan Q16 sebesar 3,61. Pola ini menunjukkan bahwa keterpaparan dan kesadaran tidak otomatis berubah menjadi tindakan politik digital yang nyata. Temuan ini sejalan dengan kajian Lorenz-Spreen et al. (2023), yang menyatakan bahwa relasi antara media digital dan demokrasi tidak selalu bersifat tunggal. Media digital dapat meningkatkan konsumsi informasi dan partisipasi, tetapi efek tersebut sangat bergantung pada konteks, bentuk partisipasi, dan karakter pengguna.

Dengan demikian, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara kesadaran politik dan keterlibatan politik aktif mahasiswa. Mahasiswa memahami pentingnya politik dan percaya bahwa suara mereka memiliki nilai, namun belum sepenuhnya terlibat dalam aktivitas politik yang konkret. Kesenjangan tersebut dapat dipengaruhi oleh rendahnya kepercayaan terhadap ruang politik, kekhawatiran akan konflik opini, kurangnya pendidikan politik yang bersifat aplikatif, serta belum tumbuhnya dorongan kolektif di lingkungan kampus Universitas Palangka Raya.

Gambar 3. Kesenjangan antara Kesadaran Politik dan Partisipasi Politik Mahasiswa

Pengaruh Media Sosial terhadap Kesadaran Politik Mahasiswa di Era Post-Truth



Terdapat gap antara kesadaran politik mahasiswa dan partisipasi politik aktif.

Sumber: Diolah dari hasil kuesioner penelitian



Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, hasil penelitian ini mendukung pandangan bahwa media sosial tidak dapat dipahami secara deterministik. Media sosial dapat menjadi sumber peningkatan kesadaran politik sekaligus sarana penyebaran hoaks dan pembentukan persepsi yang dipengaruhi algoritma. Oleh karena itu, literasi digital menjadi variabel penting yang menjembatani hubungan antara eksposur media sosial dan kualitas kesadaran politik mahasiswa.

Pada tataran praktis, temuan penelitian ini mengisyaratkan urgensi penguatan pendidikan politik dan literasi digital di lingkungan Universitas Palangka Raya. Pendidikan politik tidak dapat dibatasi hanya pada penjelasan hak dan kewajiban sebagai warga negara, melainkan harus diperluas untuk membangun kapasitas mahasiswa dalam memverifikasi informasi, mengenali bias algoritmik, memahami pola-pola disinformasi, serta terlibat secara etis dalam ruang digital. Universitas dapat merancang berbagai program yang relevan, seperti forum diskusi isu politik kontemporer, pelatihan verifikasi fakta berbasis digital, simulasi kampanye etis di media sosial, maupun debate akademik antar mahasiswa, sebagai upaya mendorong partisipasi politik yang lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data kuesioner yang diisi oleh 36 mahasiswa Universitas Palangka Raya pada periode 9 hingga 11 Juni 2025, dapat disimpulkan bahwa tingkat penggunaan media sosial dan eksposur terhadap konten politik mahasiswa berada pada kategori tinggi. Media sosial telah menjadi sumber utama informasi politik mahasiswa, baik melalui pencarian yang disengaja maupun melalui paparan pasif yang muncul secara algoritmik di beranda platform.

Literasi digital mahasiswa tergolong baik, dengan skor dimensi 4,01. Mahasiswa menunjukkan kemampuan membedakan berita benar dan hoaks, kesadaran pentingnya verifikasi informasi, dan pengakuan terhadap pentingnya literasi digital dalam menghadapi disinformasi politik. Namun, sebagian mahasiswa masih pernah terpengaruh informasi politik yang ternyata hoaks, dan kepercayaan terhadap informasi di media sosial masih bersifat moderat.

Media sosial terbukti memiliki peran penting dalam membentuk persepsi politik mahasiswa. Mahasiswa menyadari bahwa media sosial dapat meningkatkan kesadaran politik, tetapi juga dapat mempercepat penyebaran informasi yang menyesatkan dan memengaruhi pandangan politik melalui algoritma.

Kesadaran politik mahasiswa relatif tinggi pada aspek kognitif, seperti pemahaman hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan bahwa suara mahasiswa penting. Akan tetapi, partisipasi politik aktif masih lebih rendah, terutama pada aktivitas menandatangani petisi online, mengikuti diskusi politik daring, dan membagikan konten politik. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara kesadaran politik dan partisipasi politik aktif mahasiswa.

Saran

Pertama, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan data demografis responden agar analisis dapat merepresentasikan variasi jawaban berdasarkan karakteristik mahasiswa secara lebih menyeluruh. Kedua, penelitian dapat dilanjutkan dengan pengujian statistik inferensial seperti uji reliabilitas, uji korelasi, atau regresi untuk mengungkap hubungan antar dimensi secara lebih mendalam.

Keempat, pihak kampus perlu memperkuat pendidikan politik digital melalui kegiatan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mendorong praktik partisipasi politik yang etis, kritis, dan berbasis data. Kelima, mahasiswa perlu meningkatkan kebiasaan verifikasi informasi politik sebelum mempercayai atau membagikan konten di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/08/29/beaa2be400eda6ce6c636ef8/statistik-telekomunikasi-indonesia-2024.html>
- Cinelli, M., De Francisci Morales, G., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9), e2023301118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118>
- Ecker, U. K. H., Lewandowsky, S., Cook, J., Schmid, P., Fazio, L. K., Brashier, N., Kendeou, P., Vraga, E. K., & Amazeen, M. A. (2022). The psychological drivers of misinformation belief and its resistance to correction. *Nature Reviews Psychology*, 1, 13-29. <https://doi.org/10.1038/s44159-021-00006-y>

- Grizzle, A., Wilson, C., Tuazon, R., Cheung, C. K., Lau, J., Fischer, R., Gordon, D., Akyempong, K., Singh, J., Carr, P. R., Stewart, K., Tayie, S., Suraj, O., Jaakkola, M., Thésée, G., & Gulston, C. (Eds.). (2021). Media and information literate citizens: Think critically, click wisely! UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377068>
- Kubin, E., & von Sikorski, C. (2021). The role of (social) media in political polarization: A systematic review. *Annals of the International Communication Association*, 45(3), 188-206. <https://doi.org/10.1080/23808985.2021.1976070>
- Lorenz-Spreen, P., Oswald, L., Lewandowsky, S., & Hertwig, R. (2023). A systematic review of worldwide causal and correlational evidence on digital media and democracy. *Nature Human Behaviour*, 7, 74-101. <https://doi.org/10.1038/s41562-022-01460-1>
- Metzler, H., & Garcia, D. (2024). Social drivers and algorithmic mechanisms on digital media. *Perspectives on Psychological Science*. <https://doi.org/10.1177/17456916231185057>
- Pennycook, G., & Rand, D. G. (2021). The psychology of fake news. *Trends in Cognitive Sciences*, 25(5), 388-402. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2021.02.007>
- Vaccari, C., & Valeriani, A. (2021). *Outside the bubble: Social media and political participation in Western democracies*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190858476.001.0001>
- Vuorikari, R., Kluzer, S., & Punie, Y. (2022). *DigComp 2.2: The digital competence framework for citizens*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/115376>